

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
BAB 1	
OTONOMI DAERAH	1
A. Visi Otonomi Daerah	1
B. Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia	3
C. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah	4
D. Otonomi Daerah dan Pilkada Langsung	5
BAB 2	
PEMERINTAHAN DAERAH	11
A. Teori Pemerintahan yang Baik	11
B. Pemerintahan Daerah	15
C. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	20
BAB 3	
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH	23
A. Teori Kewenangan	23
B. Kewenangan Pemerintahan Daerah	27
C. Dekonsentrasi	44
D. Tugas Pembantuan	45

BAB 4

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	47
A. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	47
B. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung	53
C. Kelebihan dan Kelemahan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung	58
D. Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	64
E. Pentahapan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung	69
F. Dampak Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Terhadap Aspek Politik dan Pemerintahan, Hukum, serta Sosial Ekonomi	75

BAB 5

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DAN WAKILNYA	81
A. Landasan Norma dan Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung	81
B. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Ideal	83
C. Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakilnya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	94

BAB 6

WAKIL KEPALA DAERAH	103
A. Problematika dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	103
B. Tugas Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	109
C. Bentuk Kewenangan dari Wakil Kepala Daerah	111

BAB 7

KEWENANGAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	127
A. Mempertegas Kewenangan Fungsi dan Peran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	127
B. Disharmonis Hubungan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	145
C. Kasus Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	149

BAB 8

MODEL KEWENANGAN WAKIL KEPALA DAERAH

DALAM PEMERINTAHAN DAERAH	151
A. Konflik Hubungan Antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Berbagai Daerah di Indonesia	151
B. Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang	157
C. Kewenangan dari Model Wakil Kepala Daerah	164
DAFTAR PUSTAKA	175

BAB 9

OTONOMI DAERAH

A. Visi Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari kata *autonomos* atau *autonomia* (Yunani) yang berarti "keputusan sendiri" (*self ruling*). Otonomi yaitu hak untuk memerintah dan menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan "desentralisasi" adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Ada beberapa alasan mengapa Indonesia perlu desentralisasi. Pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara hanya terpusat di Jakarta. Kedua, pembagian kekayaan tidak merata dan tidak adil. Ketiga, Kesenjangan sosial antar satu daerah dengan daerah lain sangat mencolok.

Pelaksanaan desentralisasi haruslah dilandasi argumentasi yang kuat. Di antara argumentasi dalam memilih desentralisasi-otonomi daerah adalah:

1. Untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk terciptanya pemerintahan yang efisien dan efektif, pemerintah memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah pertama, fungsi distributif yaitu fungsi distributif, pemerintah mengelola dimensi kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Kedua, fungsi regulatif menyangkut penyediaan barang dan jasa. Ketiga, fungsi ekstraktif yaitu memobilisasi sumber daya keuangan. Keempat, fungsi universal, menjaga keutuhan negara-bangsa, mempertahankan diri dari serangan negara lain.